



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR: 150 TAHUN 2018
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : 1 Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan penyusunan Disertasi mahasiswa Program Pascasarjana UIN RADEN INTAN LAMPUNG, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pembimbing Proposal Disertasi
- 2 Bahwa dengan memperhatikan masukan, pertimbangan, dan kelayakan Proposal Disertasi yang telah diujikan, perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai Tim Pembimbing Proposal Disertasi.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
- 2 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
- 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No.5-818/ MK.02/2012 Tentang satuan biaya masukan khusus bagi dosen PTAIN di lingkungan Kementerian Agama
- 4 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- 5 Keputusan Menteri Agama RI No 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Memperhatikan : 1 Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Nomor 79 tahun 2015 tentang Tim Perumus Pedoman Akademik UIN RADEN INTAN LAMPUNG Tanggal 25 Juli 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing Proposal DISERTASI Mahasiswa Program Pascasarjana UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Kedua : Kepada Tim Pembimbing Proposal DISERTASI diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan Proposal DISERTASI sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Segala pembiayaan yang diakibatkan dari terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU UIN RADEN INTAN LAMPUNG tahun 2020.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG

PADA TANGGAL : 03 Agustus 2018

Direktur,



Irfan Kholid

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
TENTANG : PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 150 TAHUN 2018
TANGGAL : 03 Agustus 2018

| No | Nama Dosen | Gol | Jabatan Dalam Tugas | Nama Mahasiswa | NPM |
|----|------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------|
| 1 | Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag | IV/ e | Promotor | Abdul Qodir Zaelani | 1203010005 |
| 2 | Dr. Husnul Fatarib, Ph.D | IV/ a | Co Promotor | Abdul Qodir Zaelani | 1203010005 |
| 3 | Dr. Alamsyah, M.Ag | IV/ c | Co Promotor | Abdul Qodir Zaelani | 1203010005 |

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 03 Agustus 2018





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat: Jl. Z.A Pagar Alam, Kedaton, Bandar Lampung (0721-780887)

PENGESAHAN

Disertasi yang berjudul **POLITIK HUKUM 'UMAR BIN AL-KHATTĀB DAN RELEVANSINYA DENGAN PENGEMBANGAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA**, ditulis oleh Abdul Qodir Zaelani, NPM. 1203010005, telah diujikan dalam Ujian Promosi Doktor Program Studi Hukum Keluarga pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag.

Sekretaris : Dr. Liki Faisal, M.H.

Penguji I : Prof. Dr. H. Suharto, SH., M.A.

Penguji II : Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag

Penguji III : H. Husnul Fatarib, Ph.D.

Penguji IV : Dr. Alamsyah, M.Ag.

Penguji V : Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Tanggal Lulus Ujian Terbuka: 17 Juni 2020

Direktur Program Pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung

Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag

NIP.196010201988031005

ABSTRAK

'Umar bin al-Khaṭṭāb adalah khalifah yang cerdas lagi bijak. Ada banyak produk hukum yang dilakukan pada masa pemerintahan 'Umar bin al-Khaṭṭāb yang tidak sesuai dengan keputusan yang pernah diambil oleh pendahulunya. Bahkan, 'Umar bin al-Khaṭṭāb pernah merubah keputusan hukum yang telah diambilnya sendiri pada tahun pertama dengan keputusan yang baru pada tahun berikutnya. Apa yang dilakukan oleh Umar bin al-Khaṭṭāb merupakan bagian dari terobosan hukum yang bersifat progresif dan bernuansa politik hukum. Bahkan, jika dikaitkan dengan perkembangan hukum di Indonesia, apa yang telah dilakukan 'Umar bin al-Khaṭṭāb pada 14 abad yang lalu itu dalam banyak hal relevan dengan kebutuhan hukum nasional dewasa ini.

Karya ini mencoba mengungkap 4 permasalahan pokok yaitu: (1) Bagaimanakah pengembangan pemikiran hukum 'Umar bin al-Khaṭṭāb?(2) Bagaimanakah historisitas pemikiran hukum Islam 'Umar bin al-Khaṭṭāb? (3) Bagaimanakah relevansi pemikiran hukum 'Umar bin al-Khaṭṭāb terhadap pengembangan hukum keluarga di Indonesia?(4) Bagaimanakah potensi pengembangan hukum keluarga di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan situasi pengembangan pemikiran hukum 'Umar bin al-Khaṭṭāb dan kondisi sosio politik yang dihadapinyaketika mengambil keputusan hukumterhadap suatu perkara sekaligus mengungkap *spirit of Islamic law* yang beliau terapkan ketika menyelesaikan persoalan hukum yang terkadang berbeda dengan apa yang tersurat. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah relevansi apa yang menjadi tolok ukur terobosan 'Umar bin al-Khaṭṭāb dengan regulasi hukum keluarga di Indonesia, dan potensi apa yang bisa dilakukan dalam upaya pengembangan hukum keluarga.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang difokuskan pada teori, pendapat, dalil atau kaidah hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historisitas politik hukum (*historical approach*), dalam rangka melacak fakta sejarah, dan memahami filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Termasuk perubahan dan perkembangannya.

Penelitian ini menemukan fakta bahwa:(1) Umar bin al-Khaṭṭāb kerap kali dihadapkan pada sejumlah kasus hukum yang muncul pada masa pemerintahannya, baik yang berupa perkara yang tidak terdapat dalam *nash*, maupun perkara yang ada dalilnya dalam *nash* namun tidak relevan dengan konteks yang dihadapinya. Situasi ini mendorong 'Umar untuk berijtihad dengan menggunakan pemikiran progressifnya guna menyelesaikan pelbagai permasalahan hukum yang muncul, dengan tetap berpedoman pada prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum. (2) Dalam kenyataannya, pemikiran 'Umar bin al-Khaṭṭāb menggunakan perspektif politik hukum yang bersifat progresif, berdasarkan *spirit of Islamic law*. Pendekatan yang diambil 'Umar bin al-Khaṭṭāb, melalui tafsir dan takwilnya, lebih menjurus kepada *extra doctrinal reform* yang dikembangkan dari legal normatif eksetoris menuju substantif esetoris. (3) Model ijtihad dan kepemimpinan 'Umar bin al-Khaṭṭāb yang berorientasi kepada keadilan dan kemanfaatan hukum itu relevan dengan kebutuhan

pengembangan hukum keluarga di Indonesia. Upaya ini dapat dilaksanakan dalam beberapa wilayah strategis yang meliputi: 1) Wilayah politik, dalam hal ini berupa kebijakan para pemangku kekuasaan dan pengambil keputusan hukum 2) Wilayah institusional, berupa keputusan-keputusan hukum yang dibuat oleh para hakim di Peradilan Agama 3) Wilayah akademis, berupa reorientasi kurikulum di fakultas hukum, khususnya yang menyangkut hukum keluarga.

Kata Kunci: Politik Hukum, 'Umar bin al-Khaṭṭāb, Hukum Keluarga

المخلص

كان عمر ابن الخطاب أميرا ذكيا وحكيما. واجتهد عمر ابن الخطاب في قضاء الأحكام التي لم يسبقه النبي وأبو بكر فيها، بل قد نسخ وعدل عمر ابن الخطاب بعض الأحكام في السنة الأولى من خلافته بقضاء حكم جديد في السنة التالية. وما قام به عمر ابن الخطاب من الاجتهادات الحكمية التقدمية. ومن دوافع قضاء الأحكام عند عمر ابن الخطاب المجال السياسي في الحكم. وبعد الدراسات والمراجعة، إن الأحكام التي اجتهد فيها عمر ابن الخطاب لها الترابط والتناسب بالأحكام المستجدة في إندونيسيا.

لذا، حددت هذه الرسالة بالأسئلة التالية: (1) كيف التحديات التي واجهها عمر ابن الخطاب من المجال الاجتماعي أو السياسي؟ (2) وكيف تقديمية سياسية أحكام عمر ابن الخطاب في اجتهادات الأحكام في عصر خلافته؟ (3) وكيف الترابط والتناسب بين تقديمية أحكام عمر ابن الخطاب وتقديمية الأحكام في الأحوال الشخصية في إندونيسيا؟ أهداف هذه الرسالة هي الكشف عن التحديات الاجتماعية والسياسية التي واجهها عمر ابن الخطاب في تشريع الأحكام، والاطلاع على روح التشريع الإسلامي الذي قام به عمر ابن الخطاب في اجتهاداته في حل مشكلات الأحكام التي تخالف ما نصته النصوص الشرعية، والمعرفة على الترابط والتناسب بين معايير اجتهادات عمر ابن الخطاب وتنظيم الأحكام في الأحوال الشخصية في إندونيسيا.

هذه الرسالة بحث مكتبي على منهج البحث النوعي الموجه في دراسة الحكم المعياري. المصادر الأساسية لهذه الرسالة هي المؤلفات في قضاء عمر ابن الخطاب في المشكلة الاجتماعية الحكمية عند خلافته. طريقة جمع المعلومات بإجراء الدراسات السابقة في مناقشة نظرية ومناقشة الآراء والأدلة والأحكام المتعلقة بعين البحث. هذه الرسالة على منهج تاريخي سياسي حكومي في تتابع التاريخ ومعرفة فلسفة قواعد القانون ومعرفة نشأة وتطور فلسفي الذي يدفع قضاء ذلك القانون.

استنتجت هذه الرسالة: (1) بأن تحديات عمر ابن الخطاب في قضاء الأحكام هي ظهور المشاكل الجديدة في عصر خلافته. وهو يجتهد فيما لا نص به القرآن والسنة أو فيما نصت به النصوص الشرعية التي لا توافق تماما مع المشكلة التي يواجهها عمر ابن الخطاب، فاجتهد عمر بما هو أصلح. اجتهادات عمر ابن الخطاب مشتهرة بتقدمية فكره في حل المشاكل المستجدة الذي يهدف إلى العدالة والمنفعة في الحكم. (2) فكرة عمر ابن الخطاب التي لا توافق مع النصوص القرآنية والتي اخترع بها عمر باستفادات الروح القانوني هي فكرة حكمية تقدمية. نهج عمر ابن الخطاب في قضاء الأحكام على التفسير والتأويل من المعيارية القانونية نحو الإستوريس الموضوعية وأكثرها في إصلاح عقائدي إضافي، وهو على نهج اجتماعي حكومي الذي قام به لمصلحة ورفاهة المجتمع واستقرار

الحكومة.(3) اجتهادات عمر ابن الخطاب وخلافته التي تهدف إلى العدالة والمنفعة في الحكم من أهم العناصر في تطور الأحكام في الأحوال الشخصية في إندونيسيا. وقد تطورت الأحكام في الأحوال الشخصية في إندونيسيا لمشكلة الأولاد المتولدة من غير نكاح والحد الأدنى في النكاح، ولكن لا بد لكل الحكماء والقضاة أن يهدف في قضاء الحكم والقرار على العدالة والمنفعة. ومن مهمات الأمور إعادة توجيه المنهج في كليات القانون، وتطور الأحكام التقدمية والواقعية، وتطور سلطة المحاكم الدينية في حل المشاكل الحكمية في الأحوال الشخصية، في المهمشين خاصة.

الكلمة الرئيسية: الأحكام السياسي, عمر ابن الخطاب, الأحكام في الأحوال الشخصية

ABSTRACT

'Umar bin al-Khaṭṭāb was a smart and wise caliph. Many legal products were carried out during the reign of Umar bin al-Khattab which were not following the decisions made by his predecessors. The caliph even ever changed the legal decision he had taken himself in the first year with a new decision the following year. What was done by 'Umar bin al-Khaṭṭāb is part of a legal progressive breakthrough that has nuances of political law. If it is related to the development of law in Indonesia, what 'Umar bin al-Khaṭṭāb has done in the past 14 centuries ago is, in many ways, relevant to the needs of national law today.

This work tries to uncover three main problems, namely: (1) What were the social and political settings faced by 'Umar bin al-Khaṭṭāb when he made legal breakthroughs? (2) How was the condition of legal development at that time? (3) Where is the relevance of the second caliph policy to the development of family law in Indonesia? This study aims to describe the political and social situation faced by 'Umar bin al-Khaṭṭāb when making a legal decision on a case, as well as revealing the spirit of the Islamic law that he applied when resolving legal issues that sometimes differ from the sound of the scriptural text. The final aim of this research is to obtain the construction of the 'Umar bin al-Khaṭṭāb's *ijtihad* model that can be used to develop family law regulations in Indonesia.

This research is library research, which is qualitative by using normative legal research methods. The primary source is all information relating to 'Umar bin al-Khaṭṭāb's policy in deciding all problems that occur in society at that time. Data collection techniques are carried out through literature studies that focus on theories, opinions, propositions, or legal norms relating to the problem under study. This study also uses the normative historical approach (historical approach), to trace historical facts, and understand the philosophy underlying the rule of law, including its changes and developments.

This research found the fact: (1) that 'Umar bin al-Khaṭṭāb was often confronted with a number of legal cases that emerged during his reign, both in the form of cases that were not contained in the texts and cases having a legal basis but were not relevant to the context in which he was facing. This situation encouraged 'Umar to perform *ijtihad* by using his progressive thinking to solve various legal problems that arose while remaining guided by the principles of justice and the usefulness of the law. (2) In reality, the thought of 'Umar bin al-Khaṭṭāb is sometimes incompatible with the textuality of the verses of the Quran because he used a progressive perspective of the politics of law based on the spirit of Islamic law. The approach taken by 'Umar bin al-Khaṭṭāb, through his interpretation and *takwil*, leads to extra doctrinal reform developed from legal normative exoteric to substantive esoteric. (3) The *ijtihad* model and 'Umar bin al-Khaṭṭāb's leadership oriented towards justice and the benefit of the law are relevant to the development needs family law in Indonesia. These efforts can be carried out in a number of strategic areas which include: 1) Political areas, in this case in the form of policies of stakeholders and legal decision-makers, 2) Institutional areas, in the form of legal decisions made by judges in the Religious Courts 3) Academic area, in the form of curriculum reorientation in the law faculties, especially concerning family law.

Keywords: Political law, 'Umar bin al-Khaṭṭāb, Family Law

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-------------|
| COVER LUAR..... | i |
| COVER DALAM..... | ii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS..... | iii |
| PENGESAHAN..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | x |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah | 13 |
| 1. Identifikasi | 13 |
| 2. Batasan Masalah..... | 14 |
| 3. Rumusan Masalah..... | 15 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 15 |
| D. Kajian Pustaka | 16 |
| E. Kerangka Teori..... | 20 |
| F. Metode Penelitian | 39 |
| G. Sistematika Laporan Penelitian | 43 |
| | |
| BAB II POLITIK HUKUM KLASIK DAN KONTEMPORER | |
| A. Pengertian Politik Hukum | 45 |
| B. Akar Sejarah Politik Hukum..... | 53 |
| C. Pendapat Pakar Tentang Politik Hukum..... | 65 |
| D. <i>Siy</i> Sejarah <i>sah Syar'iyah</i> | 89 |
| E. <i>Siy</i> pengertiansah <i>Syar'iyah</i> | 103 |
| F. <i>Siy</i> Pendapat Pakar Tentangsah <i>Syar'iyah</i> | 126 |

BAB III POLITIK HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

- A. Politik Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan 149
- B. Integrasi Hukum Islam dan Adat Dalam Perundang-undangan 191
- C. Politik Hukum Islam Pasca reformasi 197
- D. Peran dan Fungsi Hukum Islam Dalam Perundang-undangan 199

BAB IV EPISTEMOLOGI DAN PRODUK HUKUM KELUARGA VERSI UMAR BIN AL KHATTAB

- A. Pengertian Epistimologi 214
- B. Umar bil al-Khattab dan Kondisi Sosial Kultural 218
- C. Sumber Nalar Hukum (Istidlal) Umar bin al-Khattab 247
- D. Implementasi Nalar Hukum Umar bin al-Khattab..... 254
- E. Produk Hukum Umar bin al-Khattab..... 258
- F. Model Berfikir Umar bin al-Khattab Dalam Menganalisis
Persoalan Hukum..... 267

BABA V RELEVANSI POLITIK HUKUM UMAR BIN AL-KHATTAB DALAM PENGEMBANGAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

- A. Pengembangan Pemikiran Umar bin al-Khattab 283
- B. Historitas Pemikiran Hukum Islam Umar bin al-khattab 299
- C. Relevansi pemikiran Hukum Umar bin al-Khattab terhadap
Pengembangan Hukum Keluarga di Indonesia..... 315
- D. Potensi Pengembangan Hukum Keluarga di Indonesia..... 438

BAB VI PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 461
- B. Saran 463

DAFTAR PUSTAKA 464